

# PENDEKATAN SEJARAH SOSIAL DALAM KAJIAN POLITIK PENDIDIKAN ISLAM

**Kharisul Wathoni**

Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo  
Email: wathonikharisul@yahoo.com

**Abstrak:** Dalam lintasan sejarah pendidikan Islam, aspek politik senantiasa mewarnai dan terkadang mendominasi, sehingga terdapat hubungan yang erat dan dinamis antara politik dengan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan merupakan pengejawantahan dari sebuah kebijakan dan keputusan politik, sementara di sisi lain nyaris tidak mudah untuk "mensterilkan" pendidikan dari muatan politis yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, dalam mencermatinnya, perlu pendekatan sejarah sosial sebagai pisau analisis terhadap dimensi yang "tak terucapkan" dalam panggung politik pendidikan Islam. Asumsinya bahwa pemikiran selalu merupakan hasil pergumulan pemikir dengan realitas sosial yang dihadapinya, karena setiap pemikiran selalu merupakan refleksi atas problem sosial yang berkembang pada masanya.

**Kata Kunci:** sejarah sosial, politik, pendidikan Islam

**Abstract:** political aspects has colored dominately along the history of Islamic education. It builds close and dynamic relationship between politics and education. Education enrolment is the manifestation of a policy and political decisions. On the other hand, it is not barely easy to "sterilize" education from political interests containing therein. Therefore, it takes socio- historical approach to analyze the "unspeakable" dimation of the political scene in Islamic education. As it assumes that thoughts is the result of dialectic of the thinkers about social realities faced. As consequence, every thought is always a reflection on the social problem in the era.

**Keywords:** socio-history, politic, Islamic education

## Pendahuluan

Dalam perjalanan sejarah, antara pendidikan dan politik bukanlah sesuatu yang baru. Sejak zaman Plato dan Aristoteles serta para pemikir politik telah memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam persoalan politik. Kenyataan ini dapat dilihat dalam sebuah ungkapan mereka, *as is a state, so is the school atau what you want is the state, you must put into the school*.<sup>1</sup> Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal, keduanya bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan.<sup>2</sup>

Pada hakikatnya kedua hal tersebut tak dapat dipisahkan artinya keduanya mempunyai keterpautan. Lebih jauh, bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan pengejawantahan dari sebuah kebijakan dan keputusan politik, sementara di sisi lain nyaris tidak mudah untuk men"sterilkan" pendidikan dari muatan politis yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, nuansa politik senantiasa mengharu biru dalam perkembangan sebuah pendidikan yang diselenggarakan di negara manapun.

Di samping itu, keberadaan sebuah institusi pendidikan akan sangat berpengaruh bagi perubahan kondisi sosial (*social changes*) suatu masyarakat maupun negara, sebagaimana yang diungkap oleh John L. Rury: *"So one might say that education has been on both sides of the process of social development: both as a causal agent of social change and as an aspect of life that has changed because of other social forces. The link be-*

---

<sup>1</sup>Azyumardi Azra, "Perguruan Tinggi Islam dan Kemajuan Sains" (sebuah pengantar) dalam Charles Michael Stanton, *Perguruan Tinggi Dalam Islam*, terj. Afandi dan Hasan Asari (Logos: Jakarta, 1994), hlm. vii.

<sup>2</sup>M.Sirozi, *Politik Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1.

*tween education and social change, in that case, is complex and constantly evolving. This makes it potentially interesting as a topic of study, and as a vehicle for reflection on the present*".<sup>3</sup>

Ada beberapa pengertian mengenai politik pendidikan, di antaranya seperti dikatakan oleh Kimbrough bahwa: *"The politic of educational is the process of making basic educational decision of local district wide, state wide or nation wide significance"*. (politik pendidikan adalah proses pembuatan keputusan-keputusan penting dan mendasar dalam bidang pendidikan baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional).<sup>4</sup> Di sisi lain, Archer membedakan antara politik pendidikan dengan politik kependidikan. Politik pendidikan mencakup semua interaksi sosial yang mempengaruhi pendidikan, sedangkan politik kependidikan adalah upaya untuk mempengaruhi, proses, penekanan atau aksi kelompok, eksperimentasi, investasi pribadi, transaksi lokal, inovasi internal atau propaganda.<sup>5</sup>

Terkait bagaimana posisi strategis pendidikan dalam ranah politik, Thomas Popkewits sebagaimana yang dikutip Henry Giroux mengungkapkan: *"... education theory is a form of political affirmation. The selection and organization of pedagogical activities give emphasis to certain people, events and things, Education theory is potent because its language has prescriptive qualities. A theory "guides" individuals to reconsider their personal world in light of more abstract concepts, generalizations and principles, These more abstract categories are not neutral; they give emphasis to certain institutional relationships as good, reasonable and legitimate. Visions of society, interests to be favoured and courses of action to be followed and sustain in history"*.<sup>6</sup>

Sementara itu, Michael Rush menambahkan bahwa ilmu pengetahuan politik mencakup studi permasalahan manusia, mengenai perlengkapan yang dikembangkan manusia untuk

---

<sup>3</sup>John L. Rury, *Education and Social Changes, Themes in History of American Schooling* (London: LEA, 2002), hlm. 4.

<sup>4</sup>Kimbrough, *Political Power and Educational Decision Making* (Chicago: Rand McNally & Company, 1964), hlm. 7.

<sup>5</sup>Margaret S Archer, "Educational politic, A Model for The Their Analysis", dalam ed. Ian Mcani and Jenni Ozga, *Policy Making in Education* (Great Britain: Pergamon Press, 1985), hlm. 39.

<sup>6</sup>Henry Giroux, *Pedagogy and The Politics of Hope* (Oxford: Westview Press,1997), hlm. 17.

memecahkan permasalahan tersebut, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan manusia, dan lebih-lebih mengenai ide yang mempengaruhi manusia untuk mengatasi permasalahan tersebut.<sup>7</sup> Dari berbagai pendapat di atas menunjukkan bahwa pendidikan memang pada tataran praktiknya senantiasa bersinggungan dengan politik, baik dalam konteks bahwa pendidikan perlu dikelola dengan baik, maupun bahwa realitas pendidikan yang di dalamnya terjadi proses interaksi antar manusia perlu adanya desain sedemikian rupa dalam rangka tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang diharapkan dari usaha-usaha pendidikan yang dilakukan.

Demikian halnya dalam konteks pendidikan Islam, aspek politik senantiasa mewarnai dalam perjalanan sejarahnya. Dalam sejarah Islam, hubungan antara pendidikan dengan politik dapat dilacak sejak masa-masa pertumbuhan paling subur dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sepanjang sejarah terdapat hubungan yang amat erat antara politik dengan pendidikan. Kenyataan ini dapat dilihat dari pendirian beberapa lembaga pendidikan Islam di Timur Tengah yang justru disponsori oleh penguasa politik. Contoh yang paling terkenal adalah madrasah Nizhamiyah di Baghdad yang didirikan sekitar 1064 oleh Wazir Dinasti Saljuk, Nizham al-Mulk, yang dikenal sebagai sebuah *prototype* madrasah ideal pada awal mula kemunculan lembaga formal di dunia Islam.

Politik pendidikan Islam merupakan sebuah bahasan yang menarik untuk diperbincangkan, terutama terkait dengan aspek sejarah sosialnya. Karena selama ini politik pendidikan Islam hanya dipaparkan secara naratif deskriptif tanpa ada sebuah kajian komprehensif yang berusaha menjadikannya sebagai sebuah kajian serius dan bersifat akademis. Padahal menurut Mannheim – penggagas teori sosiologi pengetahuan – setiap pemikiran selalu merupakan hasil pergumulan sang pemikir dengan realitas sosial yang dihadapinya, karena setiap pemikiran selalu merupakan refleksi

---

<sup>7</sup>Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, terj. Kartini Kartono (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 3.

atas problem sosial yang berkembang pada masanya.<sup>8</sup> Berbagai pendekatan dapat dijadikan sebagai perangkat untuk menganalisa dan meneliti politik pendidikan Islam, salah satunya adalah pendekatan sejarah sosial.

### **Pendekatan Sejarah Sosial**

Asal kata sejarah terdapat berbagai macam versi yang berusaha menariknya ke dalam bahasa asalnya. Ada yang menduga berasal dari bahasa Arab yaitu *shajarat* yang berarti pohon yang bermakna konotatif sejarah layaknya pohon yang tumbuh, berkembang, berbuah, layu dan akhirnya mati. Di samping itu yang pasti kata sejarah dalam bahasa Inggris disebut *history*, yang asal mulanya dari bahasa Yunani *istoria* yang berarti ilmu.<sup>9</sup>

Secara terminologi, sejarah didefinisikan sebagai berikut: (1) kesusastraan lama, silsilah, asal-usul; (2) kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau; dan (3) ilmu pengetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu.<sup>10</sup> Sementara itu para ahli sejarah cenderung mengartikan sejarah dengan: (1) sejumlah perubahan, kejadian dan peristiwa dalam kenyataan sekitar kita; (2) cerita tentang perubahan, kejadian dan peristiwa yang merupakan realitas kehidupan; (3) ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan, kejadian dan peristiwa yang merupakan realitas tersebut.<sup>11</sup> Taufik Abdullah mendefinisikan sejarah sebagai suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.<sup>12</sup> Di samping

---

<sup>8</sup>Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F. Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 287.

<sup>9</sup>Rustam E. Tambaruka, *Pengantar Ilmu Sejarah Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat, dan Iptek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 1-2.

<sup>10</sup>W. J. S. Purwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 646.

<sup>11</sup>R. Moh. Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 11-12.

<sup>12</sup>Taufik Abdullah, (ed.), *Sejarah dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 105.

itu, melalui pendekatan sejarah seseorang akan diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Dari keadaan ini, seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam alam idealis dengan yang ada di alam empiris dan historis.<sup>13</sup>

Ibn Khaldun, seorang pemikir besar sosial Islam, menekankan kepada para pemerhati sejarah bahwa untuk melihat kembali secara objektif, seorang sejarawan harus bisa mengenal dengan jelas berbagai struktur kebudayaan dan sosial manusia yang akan ditelitinya, termasuk berbagai pemahaman metodologi kearah ini. Tanpa mengenal dan mengerti dari dekat objek yang akan dikaji berikut metodologinya, mustahil ia bisa menjelaskan fenomena sejarah secara objektif. Tanpa metodologi yang jelas maka, alur penjelasan secara rasional atau rekonstruksi, sistematika-kronologis dan analisisnya akan sulit dimengerti.<sup>14</sup> Di samping itu, peristiwa-peristiwa sejarah tidak terjadi secara kebetulan, tetapi karena sebab-sebab tertentu. Setiap peristiwa sejarah pasti mempunyai “wataknya sendiri-sendiri”.<sup>15</sup> Hal ini mensyaratkan penyelidikan atas kejadian-kejadian sejarah itu hanya bisa diteliti dengan mengetahui watak-watak peristiwa, terutama dari segi mungkin tidaknya peristiwa-peristiwa itu terjadi. Mana yang gejala yang menurut kodratnya bersifat mungkin, gejala yang timbul karena kebetulan, dan gejala yang menurut kodratnya tidak mungkin.<sup>16</sup>

Adapun penggunaan sejarah sebagai sebuah pendekatan atau pisau analisis dalam studi Politik Pendidikan Islam, berarti mencoba sekuat tenaga memahami sejumlah peristiwa yang terkait dengan pendidikan Islam pada masa lalu, apa yang terjadi pada masa sekarang, hubungan antara keduanya, yang kemudian semua itu digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi oleh umat Islam saat ini maupun yang akan datang.

Selanjutnya, tulisan ini akan mengetengahkan berbagai pendapat yang dikutip dari berbagai sumber asing yang berusaha mengungkap

---

<sup>13</sup>Ibid.

<sup>14</sup>Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadi Thoha ( Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986), hlm. 3-13.

<sup>15</sup>Ibid., hlm. 65.

<sup>16</sup>Ibid., hlm. 61-62.

definisi sejarah sosial baik secara terminologis maupun makna fungsionalnya:

1. Menurut *Canadian Encyclopedia* mendefinisikan sejarah sosial dengan: *"is a way of looking at how a society organizes itself and how this organization changes over time. It is an approach, not a subject. The ultimate goal of social historians is to write the complete history of social relations, but this goal is unlikely ever to be achieved. Nevertheless the goal serves as a constant reminder to historians that aspects of history cannot be considered in isolation and that social history is an integrative study concerned with building towards a global picture of society. Any aspect of society can usefully be studied, but what is important is that it be studied within its relationships to other social institutions"*.<sup>17</sup> (Adalah cara untuk melihat bagaimana masyarakat mengorganisasi dirinya sendiri dan bagaimana perubahan organisasi ini dari waktu ke waktu. Ini adalah pendekatan, bukan subjek. Tujuan utama dari sejarawan sosial adalah untuk menulis sejarah lengkap tentang hubungan sosial, tetapi tujuan ini tidak mungkin pernah dicapai. Namun demikian tujuan berfungsi sebagai pengingat konstan bagi sejarawan bahwa aspek sejarah tidak dapat dipertimbangkan dalam isolasi/pemisahan dan sejarah sosial merupakan *studi integratif berkaitan dengan membangun sebuah gambaran global masyarakat*. Setiap aspek masyarakat dapat berguna dipelajari, tapi yang penting adalah bahwa hal itu akan dipelajari dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga sosial lainnya).
2. Menurut Eric Evan bahwa: *Social history in the early 21st century seems to be experiencing something of an identity crisis. This may seem surprising. During the second half of the 20th century it established a dominant position in research and an increasingly influential one in undergraduate teaching. Social history flourished on its eclecticism. Much more than did 'conventional' history writing, it assimilated both ideas and methodologies from other disciplines*.<sup>18</sup> (Sejarah sosial di awal abad ke-21 tampaknya akan mengalami sebuah krisis identitas. Hal ini adalah hal yang wajar. Karena selama paruh kedua abad ke-20 itu

---

<sup>17</sup> <http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/social-history>, diakses 19 April 2013.

<sup>18</sup> Eric Evans, *Social History* [http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/social\\_history.html](http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/social_history.html), diakses 20 April 2013.

pendekatan ini dominan dalam penelitian dan merupakan suatu hal yang semakin berpengaruh dalam pengajaran di perguruan tinggi. Sejarah sosial berkembang pada *eklektisisme*-nya. Jauh lebih dari sekedar menulis sejarah, ia menggabungkan gagasan dan metodologi dari disiplin ilmu lainnya).

3. Menurut *Encyclopedia The Freedictionary*: “Branch of history that emphasizes social structures and the interaction of different groups in society rather than affairs of state. An outgrowth of economic history, it expanded as a discipline in the 1960s. It initially focused on disenfranchised social groups but later began to focus more attention on the middle and upper classes. As a field, it often borders on economic history on the one hand and on sociology and ethnology on the other”.<sup>19</sup> (Cabang sejarah yang menekankan struktur sosial dan interaksi kelompok yang berbeda dalam masyarakat dan tidak berbicara tentang urusan negara. Ia awalnya masih berupa kajian tentang sejarah ekonomi, namun pada perkembangannya berkembang menjadi sebagai suatu disiplin pada tahun 1960. Ini pada awalnya difokuskan pada kelompok-kelompok sosial tersingkir tetapi kemudian mulai memusatkan perhatian lebih pada kelas menengah dan atas. Sebagai sebuah lapangan (kajian), ia sering berbatasan sejarah ekonomi di satu sisi dan sosiologi dan etnologi di sisi lain).
4. Menurut *Collin Dictionary*: “a view of historical events seen in terms of social trends”.<sup>20</sup>
5. Menurut *wiki.answers*: “social history is the history which is passed down from generation to generation”.<sup>21</sup>
6. Menurut University of Glasglow : “Economic and social history is the study of the way societies change in their economic activities and social organisation. It is concerned with how people in the past lived and worked, and how this has affected the development of today’s world.”<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup><http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/social+history>, diakses tanggal 20 April 2013.

<sup>20</sup><http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/social-history>, telah diakses tanggal 21 April 2013.

<sup>21</sup>[http://wiki.answers.com/Q/What\\_is\\_the\\_definition\\_of\\_social\\_history](http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_definition_of_social_history), diakses tanggal 21 April 2013.

<sup>22</sup>University of Glasgow, <http://www.gla.ac.uk/undergraduate/degrees/economic-socialhistory/> diakses tanggal 21 April 2013.

7. Menurut Peter N Stearn: *“Social history represented an advance over more traditional political history because it underscored that the stuff of history was not encapsulated in the great events and great men of the past”*.<sup>23</sup> (Sejarah sosial merepresentasikan sebuah kemajuan daripada sekedar sejarah politik tradisional, karena ia menggarisbawahi bahwa bahan sejarah tidak dirumuskan dalam peristiwa besar dan bukan juga orang-orang besar pada masa lalu).
8. Menurut Manchester Metropolitan University: *“Social History is concerned with the nature of past societies and examines the lives of individuals, classes, groups and regions that were previously considered historically unimportant”*.<sup>24</sup>
9. Menurut UIO: Departement of Archeology, Conservation and History: *“Social history is the history of society in a broad and basic sense, and not merely the history of politics and events. This implies that social history is the history of all people. Social history emerged as an academic discipline in its own right in the 1960s in response to the concentration of traditional history writing on politics, though it had precursors in the field of history. From this basis, social history has been defined and practised in different ways. It can be the history of people’s daily life, either in work or in leisure. It can be the history of formerly anonymous groups in history, such as the unpropertied, working people, ordinary people, children, women, minorities. Social history has perhaps most often been understood as the history of society as a whole, and it has offered a holistic understanding of society. Society is therefore studied in its most important components, such as gender, age groups, occupational groups, social strata or classes. Not least, the social relations between these constituent groups of society are studied. The history of social movements has usually belonged to field of social history. Social history also concentrates on basic social processes, such as urbanisation, modernisation, industrialisation, individualisation. It seeks experimentally to characterise entire forms of societies, for example feudal society, estate society, class society or welfare society. Social history has often, but not*

---

<sup>23</sup>Peter N. Stearns, *Journal of Social History* Vol.16. No.3 (Spring, 1983), hlm. 3-5.

<sup>24</sup>Manchester Metropolitan University, <http://www2.mmu.ac.uk/study/undergraduate/courses/> diakses tanggal 21 April 2013.

*always, had a structural understanding of history.*"<sup>25</sup> (Sejarah sosial adalah sejarah masyarakat dalam arti luas dan dasar, dan bukan hanya sejarah politik dan peristiwa. Ini berarti bahwa sejarah sosial adalah sejarah dari semua orang. Sejarah sosial muncul sebagai disiplin akademis pada tahun 1960, sebagai sebuah respon terhadap penulisan sejarah tradisional pada politik, meskipun ia menjadi penanda di bidang sejarah. Dari dasar ini, sejarah sosial telah didefinisikan dan dipraktikkan dengan cara yang berbeda. (sejarah sosial) bisa jadi tentang sejarah kehidupan sehari-hari seseorang, baik dalam pekerjaan maupun di waktu luang. Ini bisa menjadi sejarah tentang sebuah kelompok orang yang sebelumnya tidak dikenal, seperti gelandangan, orang yang bekerja, orang biasa, anak-anak, perempuan, kaum minoritas. Sejarah sosial mungkin lebih sering dipahami sebagai sejarah masyarakat secara keseluruhan, dan menawarkan pemahaman yang holistik tentang masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dipelajari dalam komponen yang paling penting, seperti jenis kelamin, kelompok usia, kelompok profesi, strata sosial atau kelas. Begitu juga tentang hubungan sosial antara kelompok-kelompok masyarakat. Sejarah gerakan sosial biasanya juga menjadi bidang garapan sejarah sosial. Sejarah sosial juga berkonsentrasi pada proses sosial dasar, seperti urbanisasi, modernisasi, industrialisasi dan individualisasi. Ia juga berusaha melakukan karakterisasi seluruh bentuk masyarakat, misalnya masyarakat feodal, masyarakat pemilik tanah luas, masyarakat kelas atau masyarakat makmur. Sejarah sosial seringkali memiliki sebuah struktural pemahaman sejarah).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sejarah sosial adalah sebuah disiplin ilmu tersendiri yang mempunyai spesifikasi sebagai sebuah pisau bedah untuk menganalisis sejarah berdasarkan perspektif sosiologis dan juga cenderung melihat peristiwa sejarah secara lebih komprehensif dan seobyektif mungkin berdasarkan fakta-fakta yang terkadang relatif jarang diungkap di panggung sejarah itu sendiri.

---

<sup>25</sup>UIO: Departement of Archeology, Conservation and History, <http://www.hf.uio.no/iakh/english/research/subjects/social-history/> diakses tanggal 21 April 2013.

### **Pendekatan Sejarah Sosial dalam Kajian Politik Pendidikan Islam**

Dalam lintasan sejarah Islam, adalah sebuah keniscayaan adanya campur tangan politik dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Sejak masa Rasulullah SAW. sampai pada perkembangan pendidikan Islam kontemporer. Rumah al-Arqam<sup>26</sup> yang kemudian diyakini sebagai cikal bakal penyelenggaraan pendidikan Islam adalah bukti bagaimana saat itu pendidikan Islam (*tarbiyyah*) dalam konteks pembinaan dan pengkaderan generasi Islam awal dilakukan oleh Rasulullah SAW. sebagai sebuah upaya konsolidasi ke dalam dan propaganda misi kenabian, pada hakikatnya juga merupakan sebuah upaya politis untuk membentuk sebuah kekuatan baru pada masa itu sebagai wujud perlawanan terhadap otoritas orang kafir yang saat itu tengah berkuasa. Para “murid” awal yang digembleng oleh Nabi adalah orang-orang pilihan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Islam pada tahapan-tahapan berikutnya.

Di samping itu secara sosiologis Nabi belum diakui sebagai kepala negara, bahkan kaum kafir berupaya hendak membunuhnya. Ia masih belum mempunyai posisi politik yang kuat untuk berhadapan secara langsung dengan kekuatan tirani yang berkuasa saat itu. Di sisi lain ada sebuah analisa yang menarik yang dikemukakan oleh Philip K. Hitti, ia berusaha membuat analisa mengapa Nabi saw. diutus di Mekkah, yakni dalam rangka mengatasi penyimpangan akidah dan akhlak yang selanjutnya berdampak pada terjadinya praktek perdagangan yang bersifat kapitalis.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Keputusan Nabi menyelenggarakan “pembelajaran” di rumah al-Arqam didasari keputusan politis yang memang menghajatkan demikian, dalam hal ini para sahabat diperintahkan untuk menyembunyikan keislaman, ibadah, dakwah dan pertemuannya. Tempat tinggal al-Arqâm bin Abî al-Arqâm al-Makhzumiy berada di atas bukit Shafa dan terpencil dari pengintaian mata-mata Quraisy, rumah itu dijadikan markas dakwah dan sekaligus menjadi tempat pertemuan orang-orang Islam semenjak tahun kelima kenabian. Lihat Shâfiy al-Rahmân al-Mubârafurî, *al-Rahîq al-Makhtûm* (Riyadh: Dar al- Salam, 1992), hlm. 91.

<sup>27</sup>Abuddin Nata, *Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 196.

Ketika kita memotret pendidikan Islam pada masa klasik,<sup>28</sup> ada sebuah temuan menarik yang disampaikan oleh Bassam Tibi ketika mendeskripsikan bagaimana atmosfer pembelajaran yang berkembang pada masa itu. Ia mengungkapkan sebuah realita bahwa pendidikan Islam pada masa klasik berlangsung dengan penuh “keterbatasan” dengan nuansa pembelajaran yang masih sangat “fatalistik”: *“If we look at the curriculum of educational institutions in classical Islam, it is clear that the room for creativity was very limited. There were always set texts that were to be transmitted, but could not be questioned or inquired into; reasoning was purely a matter of interpreting them. God was seen as the Creator (khâliq), and man the creature (makhlûq), who was not permitted to create and thus not to be creative. Man’s task was to accept what God had created; humans could only attempt, by means of interpreting the word of God (kalâm Allah), to better understand creation. Islamic learning methods were fixed on the holy scripture.”*<sup>29</sup> (Jika kita melihat kurikulum lembaga pendidikan dalam Islam klasik, jelas bahwa ruang bagi kreativitas sangat terbatas. Senantiasa ada teks yang mengatur, tapi tidak bisa dipertanyakan atau didebat. Allah dipandang sebagai Pencipta (*khâliq*), dan manusia makhluk (*makhlûq*), yang tidak diizinkan untuk berkreasi sehingga ia menjadi tidak kreatif. Tugas manusia adalah untuk menerima apa yang telah diciptakan Allah, manusia hanya bisa berusaha, dengan perangkat penafsiran firman Allah (*kalâm Allah*), untuk lebih memahami penciptaan. Metode pembelajaran Islam tertuju pada kitab suci).

Hal ini terjadi karena penguasa yang saat itu mempunyai kecenderungan ideologi fatalistik sehingga hal ini dideseminasikan dan disosialisasikan melalui jalur-jalur pendidikan maupun pembelajaran. Jika merujuk pada prinsip *as is a state, so is the school* atau *what you want is the state, you must put into the school* (apa yang

---

<sup>28</sup> Pengertian zaman klasik menurut Harun Nasution, adalah era antara 650-1250 M. ini terjadi semenjak Rasulullah menyebarkan risalahnya sampai hancurnya Baghdad pada abad XIII M. lihat Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 56. Hal ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mehdi Nakosteen yang cenderung mengkategorikan zaman klasik adalah rentang antara 750-1350 M. Lihat Mehdi Nakosteen, *History of Islamic Origin of Western Education A.D 800-1350 With an Introduction to Medieval Muslim Education* (Colorado: University of Colorado Press, 1964), hlm. 75.

<sup>29</sup>Bassam Tibi, *Islam between Culture and Politics* (New York: Palgrave, 2001), hlm. 172.

dikehendaki oleh negara salah satu jalan yang bisa memuluskannya yaitu melalui jalur pendidikan), maka keberadaan politik pendidikan menemukan signifikansinya.

Pendapat Bassam Tibbi di atas lantas diamini oleh pemerhati sejarah, dalam hal ini Nakosteen mengemukakan hal yang berbeda. Ia mengatakan bahwa pada abad keemasan pendidikan Islam yaitu antara tahun 750-1150 M., pendidikan Islam berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya pembatasan yang didasarkan oleh teologi maupun dogma dalam pendidikan. Nyaris semua pintu ilmu pengetahuan dibuka lebar-lebar, antara lain: di bidang filologi, psikologi, filsafat, matematika, fisika, seni, dan lain sebagainya. Mereka sangat menghargai proses pembelajaran dan kegiatan akademis. Mereka terbuka terhadap keilmuan yang datang dari manapun, sehingga ilmu pengetahuan dan filsafat dari Yunani, Persia, Hindu sampai dari dunia Kristen Barat begitu bebas diakses. Namun demikian, masih menurut Nakosteen, bahwa dunia pendidikan Islam mengalami dua periode yang berbeda. *Pertama* adalah periode di mana pendidikan dikembangkan oleh para pemilik modal yang mempunyai perhatian dalam pencerahan masyarakat. *Kedua*, periode dimana pendidikan menjadi obyek politisasi pemerintah, yang pada perkembangan selanjutnya institusi pendidikan berubah menjadi ajang tujuan-tujuan yang bersifat sektarian maupun indoktrinasi politik.<sup>30</sup>

Menurut Azyumardi, bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam sejak masa klasik hingga masa pertengahan, atau tepatnya masa pramodern, tidak menjadikan "pendidikan politik" sebagai agenda. Sebagaimana diketahui bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa-masa tersebut lebih merupakan salah satu wahana utama bagi transmisi bahkan "pengawetan ilmu-ilmu Islam". Meski pendirian madrasah misalnya sering dikaitkan erat dengan motif-motif politik, namun jika ditelusuri lebih jauh terdapat indikasi kuat bahwa ia tidak terlibat dalam proses-proses politik. Absolutisme politik muslim sebagaimana terlihat dalam eksistensi berbagai macam

---

<sup>30</sup>Mehdi Nakosteen, *History of Islamic Origin of Western Education A.D 800-1350, With An Introduction To Medieval Muslim Education* (Colorado, University of Colorado Press, 1964), hlm. 37-38.

dinasti tidak memberikan ruang bukan hanya bagi keterlibatan komunitas madrasah, melainkan bahkan masyarakat muslim umumnya, untuk turut serta dalam proses-proses politik, dan mewujudkan partisipasi politik mereka.<sup>31</sup>

Pendidikan politik, dengan demikian mungkin sedikit sekali mempunyai relevansi dengan sistem dan kelembagaan pendidikan Islam klasik dan abad pertengahan. Tetapi ini tidak berarti bahwa apa yang kita sebut sebagai "pendidikan politik" - terlepas dari tingkatan intensitas dan kedalamannya - tidak berlangsung dalam masyarakat muslim umumnya. Bahkan "pendidikan politik" itu mungkin menjadi salah satu *concern* utama bagi para pemikir politik muslim untuk merumuskan dan mengajarkan, misalnya, hak-hak dan kewajiban timbal balik antara penguasa dan rakyat. Bahkan para pemikir semacam ini menerbitkan kitab-kitab panduan, termasuk karya al-Ghazali, *Nasihat al-Mulûk*<sup>32</sup> yang diperuntukan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Semua hal yang biasa dipandang sebagai "pendidikan politik" ini, pada umumnya dilihat dari perspektif syari'ah atau fiqh.<sup>33</sup>

Lagi-lagi pendapat Azyumardi di atas kiranya perlu dipertanyakan, karena apa yang terjadi dengan Madrasah Nizhamiyah<sup>34</sup> sering dianggap sebagai titik di mana lembaga

---

<sup>31</sup>Azyumardi Azra, *Sosialisasi Politik dan Pendidikan Islam, dalam Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan Madrasah*, Vol. I. Nomor, 02/1/1997, hlm. 22.

<sup>32</sup>Judul lengkapnya buku ini adalah *Al-Tibr al-Masbûk fi Nasihat al-Mulûk*, sebuah buku yang dikarang oleh al-Ghazali di pondok pengasingannya di Thus, ketika berusia 46 tahun, atas permintaan Muhammad ibn Maliksyah, seorang raja Seljuk yang baru saja memenangkan pertikaian politiknya dengan keponakannya dalam merebut tahta. Dalam kitab ini al-Ghazali meramu kutipan al-Qur'an dan Hadis dengan kutipan-kutipan hikmah dan anekdot. Ia yang sebenarnya terkenal sebagai penentang logika Yunani khususnya Aristoteles, ternyata banyak mengutip hikmah dari para pemikir Yunani seperti Aristoteles, Galen, Socrates, Hoppocrates, dan Aleksander Agung. Di samping itu juga memuat kisah-kisah keteladanan Lukman Hakim dan juga mengutip berbagai sajak. Lihat Al-Ghazali, *Peringatan Bagi Penguasa*, terj. Ahmadi Thaha (Jakarta: Hikmah, 2000), hlm. vi- xiii.

<sup>33</sup>Ibid., hlm. 23.

<sup>34</sup>Untuk menjamin agar madrasah bisa menarik minat siswa semacam itu dan memiliki tenaga pengajar sesuai yang diinginkan, Nizham al-Mulk sangat memperhatikan sumber daya manusia yang tersedia untuk masing-masing bidang. Guru besar yang mengajar di sana menerima gaji cukup besar dan bisa membiayai

pendidikan tidak lagi netral. Sebagaimana diungkapkan oleh Joseph S. Szyliowics, ia menjelaskan bahwa meskipun dampak institusi ini diterima oleh masyarakat luas, kaum terpelajar memiliki alasan khusus yang berbeda berkaitan dengan pendirian madrasah ini, termasuk di dalamnya adalah delapan madrasah yang didirikan Nizam al-Mulk. Sebagian orang berpendapat bahwa dorongan mendasar berasal dari keinginan Perdana Menteri Saljuk yang pandai ini, dan yang menjadikan dirinya sendiri sebagai tuan besar dari Timur Tengah, yang mengangkat Islam Sunni dan mempengaruhi publik melawan doktrin Syi'ah. Beberapa orang lainnya berpendapat bahwa Nizham al-Mulk memerlukan kebutuhan tenaga berkualitas guna menangani birokrasi yang baru dibentuk dan baru tumbuh. Sebagian lagi berpendapat bahwa ia memerlukan institusi untuk memanfaatkan kekuatan potensial dari para pemimpin agama guna mempengaruhi perasaan dan opini publik.<sup>35</sup>

Pada perkembangan tahun-tahun berikutnya, sebuah fakta yang menarik pada masa klasik yang terjadi di Afrika Utara. Yaitu munculnya dua kekuasaan yaitu Daulah *Murâbitûn* (1088-1145 M) dan Daulah *Muwahhidûn* (1130-1269). Keduanya merujuk kepada sebuah sistem pemerintahan yang saling bertentangan. Terutama jika dikaitkan dengan politik Islam secara umum maupun politik pendidikan Islam secara khusus. *Murâbitûn* dikenal sebagai penguasa yang militan dan bermadzhabkan salaf.<sup>36</sup> Istilah *murâbitûn* sendiri

---

hidupnya hanya dari aktivitas intelektualnya. Bantuan untuk para siswa jumlahnya tidak banyak, yaitu mereka yang beruntung biasanya memperoleh sumbangan dari pemerintah dan para pedagang kaya. Sedangkan mayoritas pelajar lainnya terpaksa menggeluti pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan ilmiah, seperti membus kaos, bahan pewarna, kipas angin, atau menjual sutra dan sabun. Dari sudut pandang siswa, madrasah Nizhamiyah adalah sekolah yang lain menarik dengan adanya beasiswa. Menurut tradisi, calon pengajar harus mempertahankan hidup dengan melewati tahun-tahun yang panjang dan pakeklik untuk menjadi anggota kelas intelektual (kumpulan cendekiawan). Indikasi tentang makna penting beasiswa bagi mereka yang tidak mendapatkan bantuan atau sumber pendapatan independen untuk siswa. Lihat Joseph S. Szyliowics, *Pendidikan dan Modernisasi di Dunia Islam*, terj. Achmad Djainuri (Surabaya: Al-Ikhlâs, 2001), hlm. 80-81.

<sup>35</sup>Ibid.

<sup>36</sup>Kelak istilah salaf ini identik dengan gerakan yang diusung oleh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai peletak dasar sekte Wahabi.

bermula dari *ribâth* yaitu sebuah “lembaga penggemblengan/pendidikan” yang didirikan di pulau Niger, Senegal. Pada perkembangannya kemudian orang-orang yang bergabung dalam wadah *ribâth* ini disebut *murâbitûn*. Ciri khas dari golongan ini adalah cenderung puritan. Hal ini ditandai dengan adanya larangan minuman keras, penghancuran alat musik, pelarangan sufisme, memerangi suku Barghawata yang dianggap menganut faham Bid’ah. Adapun *muwahhidûn* yang muncul sebagai sebuah reaksi terhadap “penyimpangan “ *murâbitûn*, ia mengambil alih kekuasaan dari *murâbitûn*. Kebijakan-kebijakan yang selama ini diterapkan oleh *murâbitûn* dirombak secara besar-besaran. Kedua pemerintahan ini menjalankan roda pendidikan berdasar keyakinan yang dianut oleh penguasa masing-masing. Artinya pada masa *murâbitûn*, pendidikan Islam menjadi sebuah wahana penyebaran faham-faham salaf yang cenderung puritan, sementara di sisi lain pada masa Daulah *Muwahhidûn* dilakukan upaya-upaya yang cenderung menyebarkan hal yang sebaliknya yang selama ini dicela dan dilarang oleh kaum *murâbitûn*.<sup>37</sup>

Selanjutnya berbicara tentang politik pendidikan Islam di Indonesia, akan dijumpai berbagai konfigurasi sejarah sosial yang begitu beragam dan penuh dinamika. Hal ini jika ditilik dari masa perintisan pendidikan Islam pada zaman Wali Songo hingga era reformasi saat ini. Sekedar contoh, secara politis perkembangan pendidikan Islam di masa pemerintahan Orde Baru awal, adanya dualisme bisa dilihat sebagai refleksi dari pergumulan kekuatan politik; antara Islam dan Nasionalisme. Jadi, betapapun telah terjadi rekonsiliasi ideologis dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, namun pada prakteknya implikasi pergumulan ideologis ini terhadap dunia pendidikan tetap sulit dihapuskan. Hal ini kemudian juga diperkuat dengan sejarah panjang resistensi kaum muslimin terhadap sekolah umum klasikal, yang mulanya dikembangkan oleh pemerintah Kolonial, yang dicurigai sebagai *counter* terhadap pendidikan Islam. Karena itu perkembangan kebijakan pemerintahan Orde Baru terhadap pendidikan Islam, pada prinsipnya tidak dapat

---

<sup>37</sup>Musyrifah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik, Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 131-143.

dipisahkan dari pola politik Orde Baru *vis a vis* Islam. Maksudnya adalah, bahwa tingkat apresiasi pemerintah terhadap pendidikan Islam mencerminkan sejauh mana tingkat dan pola hubungan politik negara dan agama (Islam) itu sendiri.

### **Penutup**

Dalam memotret politik pendidikan Islam penggunaan pendekatan sejarah sosial adalah sebuah keniscayaan. Setidaknya hal ini untuk menelisik dan mencermati bahwa dalam situasi saat relasi Islam dan negara sering kali mengarah pada konflik, kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak terhadap kemajuan pendidikan Islam adalah mutlak diperlukan. Sebaliknya, dalam hubungan antara Islam dan negara yang cukup akomodatif maka kebijakan yang berkaitan dengan madrasah cenderung positif dan lentur. Hal ini tentu saja bisa dipahami mengingat bahwa konsolidasi dan stabilisasi kehidupan sosial, politik dan ekonomi menjadi prioritas utama dalam kacamata pemerintahan yang tengah berkuasa. Dengan pendekatan sejarah sosial juga dapat diungkap berbagai motif yang melatarbelakangi berbagai kebijakan yang diambil pemerintah sebuah negara dalam menyikapi berbagai problematika di dalam pendidikan Islam. *Wa Allâh a'lam bi al-Shawâb.\**

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Taufik, ed. *Sejarah dan Masyarakat*. Jakarta; Pustaka Firdaus, 1987.
- al-Mubârafuri, Shâfiy al-Rahmân. *al-Rahîq al-Makhtûm*. Riyadh: Dâr al- Salâm, 1992.
- Al-Ghazali, *Peringatan Bagi Penguasa*, terj. Ahmadie Thaha. Jakarta: Hikmah, 2000.
- Ali, R. Moh. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Althoff, Michael Rush dan Philip. *Pengantar Sosiologi Politik*, terj. Kartini Kartono. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Archer, Margaret S. "Educational politic, A Model for The Their Analysis", dalam ed. Ian Mcani and Jenni Ozga, *Policy Making in Education*. Great Britain: Pergamon Press, 1985.
- Azra, Azyumardi. "Perguruan Tinggi Islam dan Kemajuan Sains: sebuah Pengantar" dalam Charles Michael Stanton, *Perguruan Tinggi Dalam Islam*, terj. Afandi dan Hasan Asari. Logos: Jakarta, 1994.
- . *Sosialisasi Politik dan Pendidikan Islam, dalam Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan Madrasah*, Vol. I. Nomor 02/1/1997.
- Dhofir, Zamakhsari. *Tradition and Change in Indonesian Islamic Education*. Jakarta: Office of Religious Research and Development, Ministry of Religious Affairs of The Republic Indonesia, 1995.
- Eric Evans, *Social History*, [http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/social\\_history.html](http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/social_history.html).
- Giroux, Henry. *Pedagogy and The Politics of Hope*. Oxford: Westview Press, 1997.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pemikiran Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: PT. Gramedia, 1982.
- Khaldun, Ibn. *Muqaddimah*, Terj. Ahmadi Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Kimbrough, *Political Power and Educational Decision Making*. Chicago: Rand McNally & Company, 1964.
- Koentjaraningrat, *Penggunaan Metode-metode Antropologi dalam Historiografi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Mannheim, Karl. *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Minhaji, Akh. *Sejarah Sosial dalam Studi Islam, Teori, Metodologi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Suka Press, 2010.

- Nakosteen, Mehdi. *History of Islamic Origin of Western Education A.D 800-1350, With An Introduction To Medieval Muslim Education*. Colorado: University of Colorado Press, 1964.
- Purwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1982.
- Rury, John L. *Education and Social Changes, Themes in History of American Schooling*. London: LEA, 2002.
- Sirozi, M. *Politik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Islam Klasik, Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Szyliowics, Joseph S. *Pendidikan dan Modernisasi di Dunia Islam*, terj. Achmad Djainuri. Surabaya: Al-Ikhlâs, 2001.
- Tibi, Bassam. *Islam between Culture and Politics*. New York: Palgrave, 2001.
- Wertheim, W.F., *Pendekatan Sosiologis dalam Historiografi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- <http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/social-history>  
diakses tanggal 21 April 2013.
- <http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/social+history> diakses  
tanggal 20 April 2013.
- <http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/social-history>  
diakses tanggal 21 April 2013.
- [http://wiki.answers.com/Q/What\\_is\\_the\\_definition\\_of\\_social\\_history](http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_definition_of_social_history)  
diakses tanggal 21 April 2013.